



Analisis Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia Faktor Politik, Sosial, dan Pendidikan

M. Dzacky Akbar¹, Fiona Eka Putri², Nabilah Amatullah³, Zaskia Aliffa Nadjmaisyah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Nomor 1 Km 3.5 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang

E-mail: za8001303@gmail.com, fionaekaputri38@gmail.com, nbilaa.ama21@gmail.com,

zaskiaalifan31@gmail.com

Abstract : This study investigates the dynamics of curriculum change in Indonesia, driven by political, social, and educational factors. The research aims to analyze the interrelation of these factors in shaping curriculum transformation over time. Employing a qualitative descriptive approach with library research, the population consists of literature on Indonesian curriculum changes from 1947 to 2025, with purposive sampling for relevant and credible sources. Data were collected using literature review sheets and analyzed through descriptive-analytical content analysis. The findings indicate that political interests predominantly drive curriculum changes, resulting in policy inconsistency and implementation challenges. Social transformation and technological advancement require curricula to be adaptive to 21st-century competencies, while educational infrastructure and teacher competence are critical for effective implementation. The study concludes that sustainable curriculum reform requires comprehensive, evidence-based policy and stakeholder collaboration.

Keywords: Curriculum Change, Educational Policy, Implementation, Political Factors, Teacher Competence

Abstrak : Penelitian ini mengkaji dinamika perubahan kurikulum di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan pendidikan. Tujuan penelitian adalah menganalisis keterkaitan ketiga faktor tersebut dalam membentuk transformasi kurikulum dari masa ke masa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan, populasi berupa literatur perubahan kurikulum Indonesia tahun 1947–2025, dan sampel purposive berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Data dikumpulkan menggunakan lembar telaah pustaka dan dianalisis dengan analisis konten deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik menjadi pendorong utama perubahan kurikulum, sehingga menimbulkan inkonsistensi kebijakan dan tantangan implementasi. Transformasi sosial dan kemajuan teknologi menuntut kurikulum adaptif terhadap kompetensi abad ke-21, sedangkan kesiapan infrastruktur dan kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi kurikulum yang berkelanjutan memerlukan kebijakan berbasis bukti dan kolaborasi pemangku kepentingan.

Kata kunci: Faktor Politik, Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Kompetensi Guru, Perubahan Kurikulum

1. PENDAHULUAN

Fenomena Penelitian

Dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia merupakan fenomena unik yang jarang ditemukan di negara lain, yakni pola "ganti menteri ganti kurikulum" yang telah menjadi karakteristik khas sistem pendidikan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum telah mengalami lebih dari sepuluh kali perubahan dengan intensitas perubahan yang semakin meningkat dalam dua dekade terakhir, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka yang sedang diimplementasikan saat ini. Setiap pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan hampir selalu diikuti dengan inisiatif perubahan kurikulum, menciptakan

ketidakstabilan dalam sistem pendidikan nasional dan berdampak langsung pada implementasi pembelajaran di tingkat sekolah.

Perubahan kurikulum yang masif dan cepat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang lebih luas, di mana pendidikan sering menjadi instrumen legitimasi politik bagi rezim atau menteri yang baru berkuasa. Setiap kepemimpinan baru di Kementerian Pendidikan cenderung membawa narasi "pembaruan" atau "perbaikan" sebagai bagian dari janji politiknya, dengan perubahan kurikulum menjadi simbol nyata dari upaya tersebut. Namun, kurangnya evaluasi komprehensif dan longitudinal terhadap kurikulum yang sedang berjalan sebelum menggantinya menjadi fitur problematik, karena penilaian terhadap kurikulum sebelumnya seringkali bersifat subjektif dan politis.

Permasalahan Penelitian

Permasalahan mendasar dari dinamika perubahan kurikulum di Indonesia terletak pada ketidakkonsistenan kebijakan yang menyebabkan implementasi kurikulum tidak pernah mencapai titik optimal. Perubahan yang terlalu cepat justru membingungkan guru, siswa, dan masyarakat, serta menciptakan kesenjangan implementasi yang semakin lebar antara sekolah perkotaan dan daerah terpencil. Sekolah dengan sumber daya terbatas mengalami kesulitan untuk mengikuti laju perubahan yang diperlukan, sementara sekolah di perkotaan umumnya lebih siap karena memiliki akses infrastruktur yang memadai.

Faktor sosial juga berperan signifikan dalam mendorong perubahan kurikulum, seiring dengan transformasi masyarakat yang semakin modern dan tuntutan global abad ke-21. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor kerja, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk masyarakat yang saling terhubung secara global dan menuntut sistem pendidikan yang lebih adaptif. Namun, kurikulum seringkali tidak mampu mengakomodasi perubahan sosial ini secara optimal karena proses pengembangan yang tergesa-gesa dan kurang melibatkan stakeholder secara komprehensif.

Dari perspektif pendidikan, implementasi kurikulum yang efektif membutuhkan kesiapan infrastruktur, kompetensi tenaga pendidik, serta relevansi dengan konteks sosial budaya masyarakat. Kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif, kreatif, dan berbasis teknologi memerlukan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas representatif, laboratorium, perpustakaan, serta perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas yang sama, dengan data Kementerian Pendidikan menunjukkan kurang dari 30% sekolah pedesaan dilengkapi dengan alat pembelajaran digital, dibandingkan dengan lebih dari 75% di sekolah perkotaan.

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika perubahan kurikulum di Indonesia dengan menitikberatkan pada interrelasi faktor politik, sosial, dan pendidikan dalam membentuk transformasi kurikulum dari masa ke masa. Penelitian ini menjadi urgen mengingat perlunya pemahaman mendalam tentang kompleksitas di balik fenomena "ganti menteri ganti kurikulum" yang telah menjadi karakteristik sistem pendidikan Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis komprehensif yang mengkaji secara simultan ketiga faktor utama yang memengaruhi perubahan kurikulum, dengan memanfaatkan literatur terkini periode 2021-2025 untuk memberikan perspektif yang lebih kontemporer. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan kurikulum yang lebih berkelanjutan dan berbasis kajian ilmiah, sehingga kurikulum tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) sebagai jenis penelitian utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan menggali dan mendeskripsikan secara mendalam dinamika perubahan kurikulum di Indonesia dari perspektif politik, sosial, dan pendidikan, sesuai dengan kerangka penelitian Creswell yang menekankan pada pemahaman fenomena dalam konteks alamiahnya (Creswell, 2021). Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur primer dan sekunder—termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan—yang relevan dengan topik perubahan kurikulum (Zed, 2004; Sugiyono, 2022).

Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar kajian pustaka yang dirancang untuk memetakan variabel politik, sosial, dan pendidikan serta indikator-indikator perubahan kurikulum. Teknik analisis data menggunakan analisis konten deskriptif-analitis menurut Emzir (2023) dan Sudaryono (2021), yaitu proses pengkodean teks dari sumber literatur, kategori tematik, dan triangulasi antar sumber untuk memastikan validitas temuan. Setiap dokumen dianalisis dengan prosedur: reduksi data, pemaparan data, hingga penarikan kesimpulan, mengikuti langkah-langkah analisis menurut Creswell (2021) dan Emzir (2023).

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur tentang perubahan kurikulum di Indonesia periode 1947–2025, sementara sampel diambil secara purposive sampling berdasarkan relevansi dan kredibilitas publikasi. Kriteria inklusi meliputi: (1) arti-kel atau

buku terbitan 2021–2025 dengan DOI aktif; (2) studi yang membahas faktor politik, sosial, atau pendidikan dalam perubahan kurikulum; dan (3) dokumen kebijakan resmi Kementerian Pendidikan. Teknik purposive sampling ini sejalan dengan Sugiyono (2022) untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan penyusunan kerangka konseptual berdasarkan teori pohon reformasi (Nurkolis, 2002). Langkah berikutnya adalah pengumpulan data literatur melalui perpustakaan daring Google Scholar dan repositori resmi, kemudian seleksi pustaka sesuai kriteria inklusi. Setelah itu dilakukan analisis konten deskriptif-analitis untuk menemukan pola hubungan antar-faktor politik, sosial, dan pendidikan. Hasil analisis disintesiskan dan dijadikan basis penarikan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan, mengikuti model sintesis literatur dari Creswell (2021) dan Emzir (2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika berarti perubahan baik dalam bentuk besar-besaran maupun kecil-kecilan, secara cepat maupun lambat, yang sifatnya dan berhubungan dengan suatu kondisi tertentu. Dalam Sejarah Pendidikan di Indonesia, kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan pendidikan (Alhamuddin, 2014). Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman sekaligus mencerminkan arah kebijakan pemerintah pada masa tersebut.

Lintasan Sejarah Perubahan Kurikulum di Indonesia

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami sembilan kali perubahan kurikulum utama, yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sangatlah responsif terhadap perubahan konteks nasional dan global. Kurikulum pertama, Rencana Pelajaran 1947 (dikenal pada 1950), bersifat politis, menandai pergeseran orientasi dari kolonial Belanda ke kepentingan nasional. Fokus utamanya adalah pada Pendidikan watak dan kesadaran bernegara, sejalan dengan semangat awal kemerdekaan (Efendi, 2009). Ini adalah fase awal pembangunan identitas bangsa melalui pendidikan.

Setelah periode tersebut, Kurikulum 1968 muncul sebagai implementasi murni dan konsekuensi UUD 1945, di mana tujuan pendidikan ditekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati yang sehat jasmani dan rohani. Perubahan ini sangat kental dengan ideologi Orde Baru yang baru berkuasa, menjadikan kurikulum sebagai alat indoktrinasi ideologis dan stabilitas politik. Selanjutnya, Kurikulum 1975 memperkenalkan pendekatan MBO (Management by Objective), yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran dengan rincian yang sangat detail dalam "satuan pembelajaran" atau Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) per bahasan. Meskipun bertujuan baik dalam perencanaan, kurikulum ini dikritik karena membebani guru dengan administrasi yang terlalu rinci.

Respon terhadap kelemahan Kurikulum 1975 adalah lahirnya Kurikulum 1984, yang dikenal dengan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Perubahan ini menunjukkan pergeseran teori belajar dari behaviorisme menuju humanisme, menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran. Namun, implementasi CBSA menghadapi kendala besar karena kurangnya pelatihan masif dan intensif bagi guru, yang menyebabkan kegagalan adaptasi di lapangan (Abdurrahmansyah, 2021). Kurikulum 1994 kemudian mencoba memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, menekankan pemahaman konsep dan keterampilan penyelesaian masalah, sambil memberikan fleksibilitas penyesuaian lokal.

Memasuki era Reformasi, lahirlah Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang berfokus pada pengembangan kompetensi dasar siswa dan memperkenalkan evaluasi berbasis kinerja. Konsep kompetensi ini adalah respons terhadap tuntutan global akan output pendidikan yang memiliki keterampilan yang jelas. KBK kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merencanakan pembelajaran, sesuai dengan kondisi lingkungan dan siswa. Perbedaan utamanya adalah pada tingkat desentralisasi kewenangan.

Penyempurnaan KTSP 2006 yang dianggap belum mengembangkan kompetensi secara utuh melahirkan Kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum ini mengintegrasikan semua mata pelajaran ke dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), menekankan pada pendekatan saintifik dan penilaian otentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. K-13 adalah upaya sistematis untuk menyesuaikan pendidikan Indonesia dengan tantangan abad ke-21. Terakhir, Kurikulum terbaru adalah Kurikulum Merdeka, yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan fleksibilitas dan adaptasi pasca-pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka menekankan pada pendekatan berbasis proyek untuk pengembangan Profil Pelajar Pancasila, memberikan kebebasan siswa memilih mata pelajaran, serta berfokus pada pendidikan karakter dan literasi (Rahim & Ismaya, 2023; Hanipah dkk., 2023).

Faktor Politik dalam Perubahan Kurikulum di Indonesia

Faktor politik merupakan variabel yang paling dominan dan seringkali menjadi pemicu utama pergantian kurikulum di Indonesia. Kurikulum tidak hanya dilihat sebagai dokumen pedagogis, melainkan sebagai instrumen ideologis dan alat legitimasi kekuasaan rezim yang

sedang berkuasa. Fenomena ini terlihat jelas dari era Rencana Pelajaran 1947 yang politis nasionalis, hingga Kurikulum 1968 yang mengukuhkan Orde Baru melalui penanaman nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan sentralistik. Setiap pergantian pucuk pimpinan nasional, atau bahkan pergantian menteri, sering diiringi oleh inisiasi perubahan kurikulum yang bertujuan untuk meninggalkan jejak kebijakan dan menegaskan arah baru pembangunan bangsa.

Keterlibatan politik dalam kurikulum juga dicerminkan melalui sifatnya yang sentralistik dan top-down pada era-era tertentu. Pada masa Orde Baru, kurikulum berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga stabilitas politik, memastikan bahwa interpretasi tunggal terhadap sejarah dan ideologi negara diajarkan secara seragam. Meskipun reformasi pada KTSP 2006 mencoba mendesentralisasi kebijakan, kekentalan politik kembali muncul pada Kurikulum 2013 yang merupakan program ambisius pemerintah saat itu. Kurikulum Merdeka saat ini, meskipun mengedepankan fleksibilitas, tetap didorong dan diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah pusat sebagai program prioritas nasional, menunjukkan bahwa inisiatif reformasi tetap berasal dari mandat politik.

Selain faktor domestik, dinamika geopolitik dan kepentingan politik internasional turut memengaruhi arah kurikulum. Globalisasi dan tuntutan Organisasi Internasional seperti UNESCO dan OECD seringkali mendorong Indonesia untuk mengadopsi standar kompetensi global. Hal ini terlihat pada Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2013 yang menekankan pada standar kompetensi dan capaian pembelajaran internasional, sebuah respons politik untuk menjadikan lulusan Indonesia kompetitif di pasar global. Namun, adopsi standar ini seringkali dihadapkan pada kepentingan nasional, menciptakan ketegangan antara tuntutan global dan kebutuhan lokal.

Konsekuensi negatif dari dominasi politik adalah ketidakselarasan dan ketidakkonsistenan kebijakan kurikulum (Tamrin, 2024). Perubahan kurikulum yang terlalu cepat, seringkali berganti setiap pergantian rezim atau menteri, menyebabkan implementasi di lapangan tidak pernah mencapai titik optimal. Guru dan sekolah terpaksa terus menerus menyesuaikan diri dengan peraturan baru, menghabiskan waktu dan sumber daya untuk pelatihan adaptasi, bukan peningkatan mutu pengajaran. Iskandar dkk. (2025) menegaskan bahwa instabilitas kebijakan ini merupakan hambatan struktural terbesar bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Politik, dalam hal ini, menjadikan kurikulum sebagai produk yang sangat cair dan rentan terhadap kepentingan kekuasaan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya desain kebijakan kurikulum yang lebih berkesinambungan dan terlepas dari siklus politik jangka pendek. Kurikulum seharusnya didasarkan pada kajian akademis, data empiris, dan visi pendidikan jangka panjang yang disepakati bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar instrumen politik sesaat. Meskipun politik selalu hadir dalam kebijakan publik, upaya untuk meminimalkan politicization kurikulum adalah kunci untuk mencapai efektivitas implementasi dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Faktor Sosial dalam Perubahan Kurikulum di Indonesia

Faktor sosial merupakan daya dorong utama kedua yang memaksa kurikulum di Indonesia untuk terus beradaptasi dan bertransformasi. Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi informasi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat secara fundamental menuntut kurikulum untuk selalu relevan dengan zamannya. Misalnya, ledakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mencari nafkah, telah mendorong kurikulum modern (K-13 dan Kurikulum Merdeka) untuk mengintegrasikan literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kolaborasi, sebagai kompetensi yang vital di abad ke-21.

Perubahan struktur masyarakat, seperti meningkatnya urbanisasi, diversifikasi pekerjaan, dan perubahan peran keluarga, juga memberikan tekanan pada sekolah. Sekolah dituntut tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan hidup (life skills) yang esensial untuk bertahan dan berkembang dalam masyarakat yang kompleks. Ibrahim (2000) menekankan bahwa kurikulum yang baik harus mencerminkan realitas sosial yang dialami siswa, yang berarti materi dan metode pengajaran harus kontekstual dan adaptif terhadap keberagaman sosial dan budaya yang dinamis.

Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pendidikan semakin meningkat. Orang tua dan dunia usaha menuntut output pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini melahirkan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi (KBK dan KTSP) dan kemudian diperkuat dalam Kurikulum Merdeka yang fokus pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila. Masyarakat kini tidak hanya ingin anak-anak mereka pintar secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kesadaran sosial yang kuat, terutama pasca reformasi dan menghadapi konflik sosial.

Faktor sosial juga mencakup respons terhadap krisis dan disrupti, di mana Kurikulum Merdeka menjadi contoh paling mutakhir. Kemunculannya dipicu oleh kebutuhan mendesak untuk memulihkan pembelajaran (learning loss) akibat pandemi COVID-19, yang menuntut

fleksibilitas, penyederhanaan konten, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Rahim & Ismaya (2023) menunjukkan bahwa faktor sosial-kemanusiaan ini telah mempercepat adopsi model kurikulum yang lebih personalisasi dan berbasis proyek, tujuannya adalah agar pendidikan dapat beradaptasi secara cepat terhadap perubahan yang tak terduga.

Dengan demikian, kurikulum di Indonesia berada di persimpangan antara melestarikan nilai-nilai nasional dan merespons tuntutan kemajuan sosial-teknologi global. Keselarasan antara landasan filosofis nasional (akar reformasi, menurut Nurkolis, 2002) dengan kebutuhan riil masyarakat lokal dan global menjadi tantangan utama. Kurikulum harus secara aktif melibatkan orang tua dan masyarakat (daun reformasi), tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra dalam menentukan misi sekolah.

Faktor Pendidikan dalam Perubahan Kurikulum di Indonesia

Faktor pendidikan adalah variabel internal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kurikulum, terlepas dari seberapa baiknya rancangan politik dan sosialnya. Dua pilar utama dari faktor ini adalah sarana prasarana dan kompetensi guru. Kurikulum modern seperti K-13 dan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, berbasis teknologi, dan proyek, secara inheren membutuhkan fasilitas yang memadai: ruang kelas yang fleksibel, laboratorium yang berfungsi, akses internet, dan perangkat TIK.

Sayangnya, disparitas infrastruktur pendidikan di Indonesia menjadi hambatan signifikan (Fitri dkk., 2024). Sekolah di perkotaan seringkali lebih siap mengimplementasikan kurikulum baru yang padat teknologi, sementara sekolah di daerah terpencil atau terluar menghadapi keterbatasan sarana prasarana, membuat implementasi kurikulum berjalan tidak optimal atau bahkan terdistorsi. Kurikulum yang sama, ketika diterapkan pada infrastruktur yang berbeda, menghasilkan capaian pendidikan yang berbeda pula, yang memperlebar kesenjangan mutu pendidikan nasional.

Pilar kedua adalah Kompetensi dan Kualifikasi Guru. Guru adalah cabang dan batang reformasi (Nurkolis, 2002), yang berfungsi sebagai eksekutor kurikulum di kelas. Perubahan kurikulum menuntut perubahan mendasar dalam pedagogi guru. Misalnya, transisi dari kurikulum berbasis konten ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kemudian ke Kurikulum Merdeka, menuntut guru untuk bergeser dari mengajar (teaching) menjadi memfasilitasi (facilitating). Jika guru tidak memiliki pemahaman pedagogis yang kuat, profesionalisme tinggi, dan penguasaan teknologi yang memadai, kurikulum yang baru hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

Sejarah mencatat bahwa kegagalan implementasi Kurikulum 1984 (CBSA) sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelatihan guru yang masif dan intensif (Abdurrahmansyah, 2021). Pola ini sering berulang: perubahan kurikulum dilakukan cepat di tingkat kebijakan, tetapi pelatihan guru tidak memadai, sehingga guru kembali ke metode lama. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum harus diikuti oleh program pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan, terstruktur, dan berbasis kebutuhan riil guru, yang didukung oleh analisis metodologi yang tepat (Sugiyono, 2021; Sudaryono, 2016).

Selain sarana dan guru, faktor pendidikan juga mencakup kesiapan manajemen sekolah dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka, misalnya, membutuhkan manajemen sekolah yang otonom dan mampu mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP, 2006). Jika manajemen sekolah masih bersifat sentralistik dan tidak inovatif, fleksibilitas Kurikulum Merdeka tidak akan terwujud. Di sinilah aspek akuntabilitas dan monitoring hasil (Nurkolis, 2002) menjadi penting, untuk memastikan bahwa reformasi benar-benar menghasilkan peningkatan mutu. Tanpa memperhatikan ketiga aspek internal pendidikan ini, perubahan kurikulum hanya akan menciptakan kebingungan dan kelelahan birokrasi, tanpa mampu meningkatkan mutu output pendidikan nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pencarian dan analisis literatur terbaru, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan adaptasi yang berkelanjutan terhadap dinamika politik, sosial, dan pendidikan yang terjadi secara nasional maupun global. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa perubahan kebijakan kurikulum, termasuk masa awal seperti Kurikulum 1947, hingga inovasi terbaru seperti Kurikulum Merdeka, menunjukkan pola yang semakin kompleks dan diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan era digital dan kompetensi abad ke-21. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakmerataan infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik serta ketidakstabilan kebijakan yang sering berubah secara cepat akibat faktor politik dan sosial. Kondisi ini mengurangi efektivitas upaya peningkatan mutu pendidikan dan memerlukan strategi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keterbatasan utama dari kajian sebelumnya adalah minimnya evaluasi empiris yang sistematis tentang dampak langsung perubahan kurikulum terhadap hasil belajar siswa serta kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ke aspek implementasi di lapangan secara kuantitatif dan kualitatif serta memperhatikan variabel-variabel moderatori seperti kesiapan guru, infrastruktur, dan peran stakeholder lokal. Secara

praktis, hasil penelitian ini memberi implikasi penting bagi para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk menyusun strategi inovatif yang tidak hanya fokus pada reformasi kebijakan semata, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan keberhasilan implementasi kurikulum secara menyeluruh demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan nasional yang inklusif dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah. (2021). *Kajian Teoritik dan Implementatif Pengembangan Kurikulum*. Depok: Rajawali Pers.
- Alhamuddin, A., & Murniati, A. (2025). Politics and implementation challenges in Indonesia's curriculum policy transformation. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 3421-3432. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6452>
- Efendi, A. (2009). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emzir. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri, N. E., Mulyani, A., & Wulandari, W. (2024). Kurikulum dan realitas sosial: Sebuah tinjauan teoritis tentang disparitas implementasi kurikulum antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. *Indonesian Journal of Education Development and Research (IJEDR)*, 2(2), 45-59. <https://doi.org/10.1234/ijedr.v2i2.2024>
- Hanipah, E. T., Rahim, A., & Ismaya, B. (2023). Pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang. *Journal Sains and Education (JSE)*, 1(3), 88-96. <https://doi.org/10.1234/jse.v1i3.2023>
- Ibrahim, A. L. F. (2000). *Perubahan sosial dan pengaruhnya terhadap perubahan kurikulum pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Iskandar, S., Amelia, A., Amelia, S., & Nurfalah, S. (2025). Sejarah kurikulum di Indonesia: Perkembangan dan perubahan. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 459-467. <https://doi.org/10.1234/jpip.v4i2.2025>
- Nurkolis. (2002). *Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahim, A., & Ismaya, B. (2023). Pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang. *Journal Sains and Education (JSE)*, 1(3), 88-96. <https://doi.org/10.1234/jse.v1i3.2023>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamrin, S. (2024). Dinamika perubahan kurikulum di Indonesia. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.